



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, $\frac{18 \text{ Agustus } 2023 \text{ M}}{1 \text{ Shafar } 1445 \text{ H}}$

Nomor : 903/771/APKD/BPKAD-2023
Lamp : 1 (satu) berkas
Sifat : Penting
Perihal : **Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023**

Yth. 1. Bupati/Wali Kota
2. Ketua DPRD
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat
di
Tempat

Berkenaan dengan upaya percepatan penyusunan, kesepakatan, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (bagi Kabupaten/Kota yang melakukan Perubahan APBD TA. 2023), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Berdasarkan Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 179 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
2. Selanjutnya pada butir F.1.f.(27(a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi dasar dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 serta *persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.*
3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, diminta perhatian Saudara agar mematuhi dan konsisten terhadap batasan waktu yang telah ditentukan dan segera melakukan langkah-langkah guna percepatan penyusunan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Gubernur.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA. 2023 agar memperhatikan ketentuan terkait pemenuhan belanja yang bersifat mandatoris, antara lain :
 - a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah.
 - b. Alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
 - c. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
 - d. Alokasi anggaran belanja yang memadai untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Alokasi anggaran pengawasan oleh APIP pada Inspektorat dengan ketentuan paling sedikit :
 - 1) 1,00% dari belanja daerah, bila total belanja kecil/sama dengan 1 triliun rupiah.
 - 2) 0,75% dari belanja daerah, bila total belanja antara 1 triliun rupiah s/d 2 triliun rupiah.
 - 3) 0,50% dari belanja daerah, bila total belanja diatas 2 triliun rupiah.
 - f. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan ASN sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja.
 - g. Penggunaan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40%.
5. Sesuai amanat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023 maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan dokumen formulir Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa produk dalam negeri. Bila dokumen ini tidak disampaikan maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2023 tidak dapat dievaluasi oleh Gubernur.
6. Untuk kebutuhan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diminta kepada Saudara untuk menyampaikan kelengkapan dokumen evaluasi **sebagaimana terlampir (format dan penyajiannya berpedoman kepada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan merupakan hasil print out keluaran dari SIPD).**

7. Berdasarkan Pasal 101 Ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebelum mendapatkan Nomor Registrasi dilakukan verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyempurnaan. Hasil verifikasi diberikan apabila hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota diminta untuk menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang memadai atas rekomendasi yang diberikan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan :

Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Lampiran Surat Gubernur Sumatera Barat
Nomor : 903/771/APKD/BPKAD-2023
Tanggal : 18 Agustus 2023
Perihal : **Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023**

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PENYAMPAIAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA 2023 UNTUK EVALUASI GUBERNUR

1. **Asli Surat Bupati/Wali Kota** perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur untuk dievaluasi **(1 rangkap)**;
2. Surat Bupati/Wali Kota perihal penyampaian rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS TA 2023 kepada DPRD Kabupaten/Kota **(1 rangkap)**;
3. Surat Bupati/Wali Kota perihal penyampaian rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD TA 2023 kepada DPRD Kabupaten/Kota **(1 rangkap)**;
4. Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS beserta dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS TA 2023 **(1 rangkap beserta softcopy)**;
5. Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2023 **(1 rangkap)**;
6. **Asli Berita Acara Persetujuan Bersama** antara Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD TA 2023 **(1 rangkap)**;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2023 **(2 rangkap beserta softcopy dan merupakan hasil print out keluaran dari SIPD)**;
8. Dokumen Perubahan RKPD TA 2023 **(1 rangkap beserta softcopy)**;
9. RPJMD/RPD yang masih berlaku **(softcopy)**;
10. Risalah Sidang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota TA 2023 **(1 rangkap)**;
11. Tabel tahapan dan jadwal mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD TA 2023 **(2 rangkap)**;
12. Sinergitas dan Penyelarasan Program Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel yang menampilkan total keseluruhan untuk penjumlahannya pada masing-masing kolom)**;

13. Prioritas pembangunan masing-masing daerah yang tercantum pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel yang menampilkan total keseluruhan untuk penjumlahannya pada masing-masing kolom);**
14. Tabel Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD TA 2023 dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel yang menampilkan total keseluruhan untuk penjumlahannya pada masing-masing kolom);**
15. Tabel perhitungan pendapatan yang bersumber dari dana transfer umum pemerintah pusat dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel yang menampilkan total keseluruhan untuk penjumlahannya pada masing-masing kolom);**
16. Tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel);**
17. Tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel);**
18. Tabel format perhitungan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel);**
19. Tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya dengan format mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel);**
20. Tabel Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel);**
21. Tabel alokasi anggaran untuk Inspektorat/APIP Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya **(1 rangkap beserta softcopy dalam format excel);**

22. Tabel alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
23. Tabel alokasi anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
24. Tabel alokasi anggaran dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
25. Tabel alokasi anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
26. Tabel kesesuaian jumlah program, jumlah kegiatan, jumlah sub kegiatan dan jumlah anggaran pada Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Perubahan APBD (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
27. Tabel format komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy**).
28. Tabel Alokasi Sharing Pendanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel, diisi jika ada**).
29. Tabel alokasi anggaran pengendalian, pemberantasan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
30. Tabel alokasi anggaran pengendalian inflasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan rencana perubahannya (**1 rangkap beserta softcopy dalam format excel**);
31. *Pointer berisikan rangkuman informasi terkait Rancangan Perda Perubahan APBD dan Perkada Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 (softcopy excel).*
32. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 31 Agustus 2023 (**1 rangkap beserta softcopy**).
33. Contoh format tabel sebagaimana angka 11 s/d 31 dapat diunduh pada tautan berikut: **https://bit.ly/Form_Evaluasi_PAPBD2023**.
34. *Seluruh kelengkapan dokumen (dalam bentuk hardcopy) yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas adalah **dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang**.*